

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
Bab I: PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah	12
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	16
F. Tujuan Penelitian	16
G. Batasan Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	17

Bab II: Kerangka Kebijakan MP3EI yang Dijabarkan dalam MIFEE, dan MIRE Dalam Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan SBY	18
A. Arah Pembangunan Indonesia	18
B. Fokus Pembangunan di Era SBY	25
C. Kebijakan pemerintah SBY dalam program MP3EI di Mega Proyek MIFEE, dan MIRE	33
C.1. Kerangka kebijakan MP3EI dalam proyek MIFEE	37
C.2. Kerangka kebijakan MP3EI dalam Proyek MIRE	42
D. Kesiapan Merauke Dalam Rencana Kebijakan MIFEE	46
Bab III: Formulasi Kebijakan MIFEE yang Melibatkan Beragam Stakeholder	49
A. Struktur Hubungan dan Proses Perumusan Kebijakan MIFEE .	50
B. Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Proses Mega Proyek MIFEE	57
C. Posisi Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Mega Proyek MIFEE	69
Bab IV Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Kebijakan Publik	14
Gambar 2.2 Kemiskinan di Indonesia	28
Gambar 2.3 Kerangka Desain Pendekatan MP3EI	35
Gambar 2.4 Tema Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia	36
Gambar 3.6 Peta Investasi dari BAPINDA Tahun 2010	59
Gambar 3.9 Peta Arahkan Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP).....	66

UnRegistered

DAFTAR TABEL

Gambar 3.5 Srtuktur Penyusunan Konsep MP3EI	52
Gambar 3.7 Grand Desain MIFEE	60
Gambar 3.8 Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Merauke	63

UnRegistered

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
AEZ	<i>Agro Ecological Zone</i>
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BUMN	Badan Usaha Milik Negar
BBU	Balai Benih Umum
BPPN	Badan Perimbangan Pendidikan Nasional
BBU	Balai Benih Umum
BKPRN	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
BOFE	Badan Otoritas <i>Food Estate</i>
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CG	<i>Clean Government</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GG	<i>Good Governance</i>
HIPMI	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HPT	Hutan Produksi Terbatas
HPK	Hutan Produksi Konversi
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ICAS	<i>Intregrated Corporate Argribusiness Sytem</i>
IMF	<i>Internasional Monetary Fund</i>
ICT	<i>Information and Commnication Technologies</i>
KSP	Kawasan Sentral Produksi
KTI	Kesatuan Tani Indonesia

KEN	Komite Ekonomi Nasional
KIN	Komite Inovasi Nasional
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MIFEE	<i>Merauke Intergrate Food and Energy Estate</i>
MIRE	<i>Merauke Intergrate Rice Estate</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDB	Produksi Domestik Bruto
PP	Peraturan Pemerintah
PMA	Penanaman Modal Asing
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
REPELITA	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRWN	Rencana Tata Ruang Nasional
SUN	Surat Utang Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SITTPP-BEL	Sistem Integrasi Tanaman Ternak Perikanan Perkebunan Bebas Limbah